

## **PROPOSAL PENELITIAN**

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di  
Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo



Dosen Pembimbing:

**Dr. Eni Rustianingsih, S.T, M.T**

Disusun Oleh :

**Fiony Dwi Pratiwi 202020100092**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**  
**FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**2023**

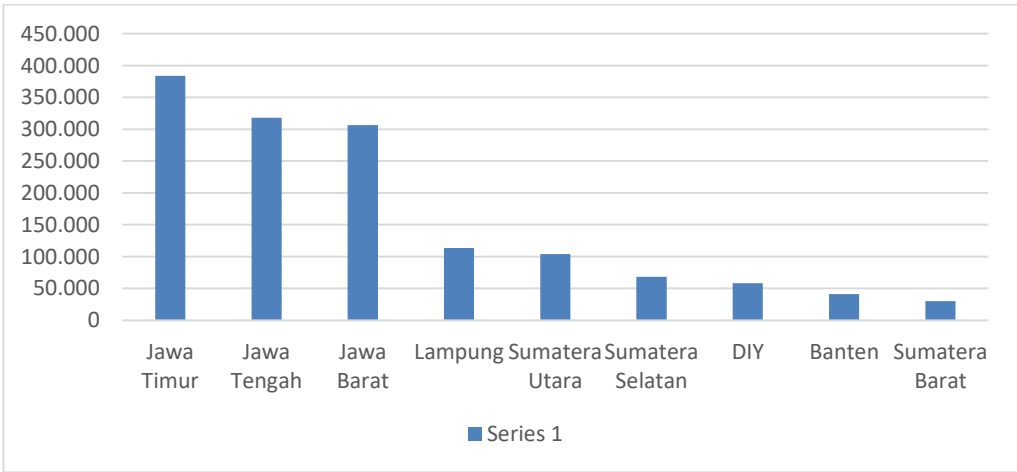
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji. Kemiskinan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (multiplier effects) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan merupakan muara dari masalah sosial lainnya. (refrensi implementasi program PKH) Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Berbagai upaya pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Pemerintah menggulirkan berbagai bantuan dan menstabilkan harga pangan. Selain itu melalui penguatan aktifitas ekonomi seperti mendorong percepatan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan.

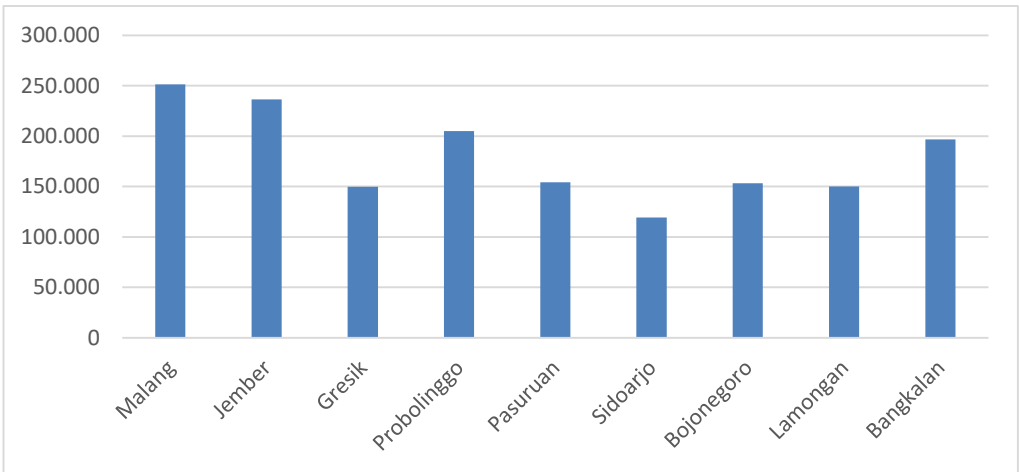
Diagram 1. Data 10 Provinsi menurunkan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia Tahun 2021-2023



Sumber: Humas Pemerintah Provinsi Jatim 2023

Berdasarkan data Humas Pemprov Jatim 2023 pada Tabel 1 menunjukkan data jumlah 10 Provinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia dari tahun 2021-2023. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang berhasil menurunkan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu sejumlah 383.920 jiwa. Provinsi Jawa Tengah menempati posisi nomor dua yakni 318.210 jiwa, dan di posisi ketiga di peroleh provinsi Jawa Barat sejumlah 306.740. Terlihat bahwa berbagai upaya Pemerintah Provinsi cukup relevan dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Diagram 2. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistika 2023

Menurut Tabel 2 terdapat jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2023 yakni menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berhasil menurunkan jumlah angka kemiskinan yang dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin hanya sejumlah 119.15 ribu jiwa dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini menjadi sebuah pembuktian bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengentas kemiskinan sudah cukup berhasil. Salah satu aspek keberhasilan pembangunan daerah adalah diukur dari indeks pembangunan kesehatan sumber daya manusianya. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar untuk pembangunan manusia secara fisik.

Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat miskin. Masyarakat Indonesia berhak memperoleh pelayanan kesehatan dimana pelayanan yang dibutuhkan harus disediakan dan dijamin oleh Pemerintah Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 28 H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (dikutip oleh implementasi program PBI pekan baru).

Beberapa Program Jaminan Kesehatan dibuat untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya di pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berperan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dengan membentuk suatu program yakni program JKMM yang didukung oleh Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu.

Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) merupakan program pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, serta layanan kesehatan lainnya yang belum terakomodir dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau program jaminan pelayanan kesehatan diluar Jaminan Kesehatan Nasional. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) ini pembiayaannya dikelola oleh Dinas Kesehatan yang bekerja sama dengan beberapa instansi kesehatan seperti Puskesmas seluruh Kabupaten Sidoarjo, RSUD Kab. Sidoarjo, RSUD Sidoarjo Barat, RS Dr. Soetomo, dan RSJ Menur Surabaya. Peserta JKMM yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap dengan penjaminan biaya pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo harus melengkapi beberapa dokumen persyaratan kepesertaan JKMM untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial.

Tabel 1. Jumlah pemohon program JKMM di Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Jumlah jiwa
2022	7.322 pemohon
2023	7.400 pemohon

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo 2023

Berdasarkan data pada Tabel 1, Jumlah pemohon program JKMM menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2022 sejumlah 7.322 pemohon dan pada tahun 2023 sejumlah 7.400 pemohon. Hal ini berbanding terbalik dengan adanya jumlah penurunan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Perlu adanya penyesuaian antara angka kemiskinan dan pemohon surat rekomendasi jaminan kesehatan. Dapat dilihat dari sumber permasalahan tersebut peneliti mengkaji dan menganalisis implementasi program JKMM di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Beberapa penelitian sebelumnya, membahas tentang implementasi program jaminan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah untuk masyarakat kurang mampu. Penelitian pertama dilakukan oleh Husni Zelika dkk (2022) yang berjudul “Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Di Kota Pekanbaru” penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Menggunakan teori implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaannya belum maksimal. Kemudian terdapat faktor penghambat dalam implementasi program penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang program PBI Jaminan Kesehatan, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dan kinerja organisasi pelaksana yang kurang optimal. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan teori Korten sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori Goerge Erdward III.

Prosedur pelayanan dibuat secara sistematis agar memudahkan pemohon untuk mendapatkan rekomendasi JKMM. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di Dinas Sosial Sidoarjo sudah berjalan optimal akan tetapi peneliti menemukan masih terdapat permasalahan di lapangan, yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang program jaminan kesehatan dari pemerintah daerah yaitu terdapat beberapa masyarakat yang sudah terlanjur menerima pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit swasta yang sudah tidak lagi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga biaya kesehatan tidak bisa ditanggung oleh pemerintah karena kurang sesuai dengan aturan yang ada.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas ada banyak hal yang menarik sebagai temuan awal yang ada dilapangan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JKMM) di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo agar lebih baik kedepannya dalam pengimplementasian tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi program jaminan kesehatan masyarakat miskin dalam meningkatkan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Sidoarjo ?

## **1.3 Tujuan**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program jaminan kesehatan masyarakat miskin dalam meningkatkan kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Sidoarjo.

## **1.4 Manfaat**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikat manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktiss sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara Teoritis diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di Lingkungan Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, serta akan memberikan pemahaman dan gambaran tentang implementasi program bantuan JKMM

b. Kegunaan secara praktis

1. Bagi Akademis diharapkan akan memberi pemahaman, pengetahuan dan gambaran utuh tentang implementasi program jaminan kesehatan masyarakat miskin.
2. Bagi Pemerintah diharapkan sebagai masukan untuk merumuskan implementasi program JKMM.
3. Bagi masyarakat diharapkan sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang belum mengenal jauh tentang implementasi program JKMM.